

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Layanan Pembelajaran Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di SD Negeri Ciledug

Eviscia Risti Maharani*

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

evisciaristi22@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Juli 10, 2025

Revised : Juli 30, 2025

Accepted : Agustus 11, 2025

Keywords :

Inclusive education;
children with special needs;
policy implementation;
quality of learning services;
SD Negeri Ciledug 02;



Copyright (c) 2026

Jurnal Reformasi Administrasi:
Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan
Masyarakat Madani

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of inclusive education policies in improving the quality of learning services for children with special needs at SD Negeri Ciledug 02, Setu, Bekasi. Inclusive education is a policy that aims to provide equal opportunities for all children, including children with special needs, to get a decent and quality education in a public school environment. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, direct observation and documentation. The results show that the implementation of the inclusive education policy at SD Negeri Ciledug 02 has gone well, although there are still challenges in terms of providing adequate facilities, training for teachers and parental involvement. Nevertheless, there are real efforts from the school to provide services that suit the needs of children with special needs, such as curriculum adaptation, individualized teaching and providing emotional support. Based on these findings, it is recommended to improve training for teachers, improve school facilities and infrastructure, and increase cooperation with parents and related institutions to strengthen the implementation of inclusive education policies in the future.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia yang tidak boleh didiskriminasi atas dasar apapun, termasuk kondisi fisik, intelektual, emosional, maupun sosial. Dalam konteks pendidikan nasional, jaminan hak atas pendidikan telah tertuang secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 31 dan diperkuat oleh berbagai regulasi turunannya. Hal ini menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi lahirnya kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang adil bagi semua peserta didik tanpa kecuali. Pendidikan inklusif bukan hanya strategi administratif, melainkan refleksi dari nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Pendidikan inklusif menuntut penyediaan lingkungan belajar yang adaptif dan ramah terhadap perbedaan. Konsep ini menekankan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) seharusnya tidak dipisahkan atau diasingkan dari teman sebayanya, melainkan diberdayakan dalam satuan pendidikan reguler dengan dukungan yang memadai. Implementasi pendidikan inklusif bukanlah sekadar memasukkan ABK ke dalam kelas reguler, tetapi melibatkan perubahan budaya sekolah, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi yang mengakomodasi kebutuhan individual peserta didik. Dalam konteks ini, peran guru menjadi sangat strategis, karena mereka merupakan agen utama dalam menciptakan iklim pembelajaran yang inklusif dan transformatif.

Secara global, komitmen terhadap pendidikan inklusif telah lama disuarakan, antara lain melalui *The Salamanca Statement* (1994) yang menyerukan kepada semua negara agar mengembangkan sistem pendidikan inklusif. Selain itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) pada poin keempat juga menekankan pentingnya menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua anak. Indonesia merespon komitmen global ini dengan menerbitkan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Namun, tantangan besar masih menghambat implementasinya di tingkat satuan pendidikan, terutama pada sekolah dasar negeri yang umumnya menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta minimnya pelatihan khusus bagi guru.

Bekasi sebagai wilayah penyangga ibu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk sangat cepat juga menghadapi kompleksitas tantangan pendidikan. Dalam wilayah Setu, SD Negeri Ciledug 02 menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Penunjukan ini bukan tanpa alasan, mengingat jumlah ABK yang terus meningkat serta tuntutan masyarakat akan pelayanan pendidikan yang ramah terhadap semua anak. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat niat baik dari para pemangku kebijakan dan pelaksana pendidikan, berbagai hambatan struktural dan kultural masih menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif secara efektif.

Sebagai contoh, keterbatasan jumlah guru pendamping khusus (GPK), minimnya pelatihan berkelanjutan bagi guru reguler, kurangnya sarana pembelajaran yang sesuai, serta masih adanya stigma dari sebagian warga sekolah terhadap ABK, menjadi tantangan serius. Sekolah sering kali harus berimprovisasi dengan sumber daya yang terbatas demi memastikan bahwa hak pendidikan ABK tetap terpenuhi. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana praktik pendidikan inklusif berjalan di sekolah tersebut, strategi apa yang diterapkan, serta sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dan pusat hadir mendukung implementasi nyata di sekolah dasar.

Penelitian ini dilakukan sebagai respon atas pentingnya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri, khususnya di SD Negeri Ciledug 02. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh pelaksanaan kebijakan inklusi di sekolah tersebut, termasuk faktor pendukung, kendala yang dihadapi, serta dampak terhadap kualitas pembelajaran ABK. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pendidikan inklusif di tingkat akar rumput.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Ciledug 02, Setu, Bekasi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena secara mendalam, khususnya terkait dengan proses, dinamika, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengalaman guru, siswa, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan praktik inklusif di lingkungan sekolah dasar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas pembelajaran di kelas inklusi, wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus (GPK), serta orang tua siswa ABK. Selain itu, peneliti juga melakukan telaah dokumentasi terhadap dokumen-dokumen penting seperti RPP, kurikulum sekolah, notulen rapat sekolah, serta laporan kegiatan pelatihan guru. Teknik triangulasi data digunakan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara simultan selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Reduksi data bertujuan menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan tematik. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul dari data empiris untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan, hambatan, dan praktik baik dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Ciledug 02 telah berjalan dengan baik meskipun menghadapi berbagai tantangan. Secara umum, sekolah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan inklusif, seperti penerimaan tanpa diskriminasi, pemenuhan kebutuhan individual peserta didik, dan keterlibatan seluruh warga sekolah dalam proses pendidikan anak berkebutuhan khusus.

1. aspek kebijakan dan manajemen sekolah

kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama dalam membangun kultur inklusif. Ia secara aktif mendukung pelatihan guru, mengalokasikan anggaran untuk sarana pendukung, serta memfasilitasi komunikasi intensif antara guru, orang tua, dan tenaga pendukung. Kepala sekolah juga menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan serta lembaga profesional lainnya guna mendapatkan pendampingan dan supervisi dalam penguatan kebijakan inklusi.

2. tenaga pendidik

sebagian besar guru menunjukkan sikap positif terhadap keberadaan siswa ABK di kelas reguler. Meskipun beberapa guru masih merasa kurang percaya diri karena belum memiliki pelatihan khusus, mereka menunjukkan keinginan kuat untuk belajar dan beradaptasi. Upaya guru dalam melakukan diferensiasi instruksional dan adaptasi kurikulum terlihat dari penggunaan berbagai metode pembelajaran, modifikasi tugas, dan pendekatan individual saat menghadapi siswa ABK.

3. Guru Pendamping Khusus (GPK)

keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) menjadi faktor kunci yang memperlancar proses pembelajaran inklusif. GPK berperan dalam merancang program pembelajaran individual (PPI), memberikan bimbingan langsung kepada siswa ABK, serta menjadi jembatan komunikasi antara guru kelas dan orang tua. Meskipun jumlah GPK masih terbatas, keberadaan mereka sangat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.

4. keterlibatan orang tua siswa ABK di sekolah ini tergolong aktif

Orang tua dilibatkan dalam penyusunan PPI, kegiatan sekolah, serta diskusi berkala tentang perkembangan anak. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua menciptakan suasana saling percaya yang penting bagi keberhasilan pendidikan inklusi.

5. Sarana dan prasarana

Sekolah telah melakukan beberapa penyesuaian seperti penyediaan akses fisik ramah disabilitas (ramp, toilet khusus), ruang belajar yang fleksibel, serta alat bantu pembelajaran. Namun demikian, fasilitas tersebut masih belum sepenuhnya memadai, dan sekolah masih membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah daerah untuk pengembangan sarana yang lebih inklusif.

6. tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri Ciledug 02 adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Selain itu, beban kerja guru reguler yang tinggi juga menjadi hambatan dalam memberikan perhatian optimal kepada siswa ABK. Untuk mengatasi hal ini, sekolah telah berupaya menjalin kemitraan dengan komunitas dan organisasi sosial yang peduli terhadap isu disabilitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kolaborasi yang sinergis antar pemangku kepentingan, sikap positif tenaga pendidik, serta komitmen institusional yang kuat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan berkelanjutan, dukungan kebijakan konkret, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Ciledug 02, Setu, Bekasi menunjukkan arah perkembangan yang positif dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keberhasilan ini tidak lepas dari peran sentral kepala sekolah dalam membangun kultur inklusif, dukungan guru dalam melakukan penyesuaian pembelajaran, serta keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang membantu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa.

1. Peningkatan Kapasitas Guru Secara Terstruktur

Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi diharapkan menyusun program pelatihan berseri yang berfokus pada pendidikan inklusif. Pelatihan ini mencakup pendekatan pembelajaran berbasis

kebutuhan khusus, teknik asesmen autentik, serta pengelolaan kelas multikultural dan multikapasitas. Sertifikasi kompetensi bagi guru dalam bidang pendidikan inklusif juga perlu dipertimbangkan sebagai upaya memperkuat profesionalisme.

2. Penambahan dan Penguatan Peran Guru Pendamping Khusus (GPK)

Jumlah GPK harus disesuaikan dengan rasio peserta didik ABK agar intervensi pendidikan berjalan optimal. Selain itu, GPK juga perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum adaptif dan menjadi bagian dari tim pengembang pembelajaran inklusif di tingkat sekolah.

3. Penguatan Kepemimpinan Inklusif di Lingkungan Sekolah

Kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional harus diberdayakan dengan pelatihan manajerial dan kepemimpinan inklusif. Peningkatan kapasitas ini bertujuan agar kepala sekolah mampu merumuskan kebijakan sekolah yang lebih adaptif terhadap keberagaman peserta didik dan membangun budaya kolaboratif di antara seluruh warga sekolah.

4. Penyediaan Infrastruktur dan Media Pembelajaran Inklusif

Pemerintah daerah harus melakukan audit fasilitas secara berkala dan menyediakan anggaran khusus untuk membangun lingkungan fisik sekolah yang bebas hambatan. Termasuk di dalamnya adalah ramp akses, toilet difabel, ruang terapi, serta alat bantu belajar seperti audio book, huruf braille, dan perangkat augmentatif.

5. Membangun Ekosistem Kemitraan yang Berkelanjutan

Sekolah harus aktif menjalin kerja sama dengan lembaga rehabilitasi, pusat psikologi anak, LSM, serta komunitas disabilitas. Kemitraan ini menjadi modal sosial penting dalam mendukung pembelajaran dan pemulihan fungsi sosial anak berkebutuhan khusus.

6. Sistem Evaluasi Program yang Responsif dan Inklusif

Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, siswa, dan komunitas. Evaluasi ini harus memuat indikator pencapaian yang relevan dengan dimensi inklusi seperti keberhasilan adaptasi kurikulum, keterlibatan sosial siswa ABK, serta peningkatan hasil belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2009). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Miles, S., & Singal, N. (2010). The Education for All and Inclusive Education Debate: Conflict, Contradiction or Opportunity?. *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1–15.
- Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Sharma, U., Forlin, C., & Loreman, T. (2008). Impact of Training on Pre-service Teachers' Attitudes and Concerns about Inclusive Education and Sentiments about Persons with Disabilities. *Disability & Society*, 23(7), 773–785.
- Slee, R. (2011). *The Irregular School: Exclusion, Schooling and Inclusive Education*. Routledge.
- UNESCO. (2005). *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*. Paris: UNESCO.
- Winardi, A. (2017). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 3(2), 45–57.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana.